

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO BUDIWIYANTO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR II**
3. NHK : **155303**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **473.080.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/173 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 135.980.000
2. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, LAINNYA Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 211 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 232.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **127.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **15.060.000****D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **27.905.144****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **643.545.144**



III. HUTANG

Rp. 19.360.360

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 624.184.784

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.